

DAFTAR PUSTAKA

- 2 <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/21768/3/Chapter%20II.pdf>. (n.d.).
- Anggara, S. (2018). *Hukum Administrasi Negara by Dr. Sahya Anggara, M.Si*. 276.
- Aristoteles. (1995). *Tomo II* (Gredos (Ed.)).
- Atmosudirdjo, P. (2004). *Hukum Administrasi Negara*. Glora Madani Press.
- Aunorrohim, M. (n.d.). *Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan Hukum di Indonesia*.
- Avianti, F. (2009). “Kebijakan Perundang-Undangan Mengenai Badan Penyidik dalam Sistem Peradilan Pidana terpadu di Indonesia”. *Hukum Ius Quia Iustum*, 16.
- B.Harmadi, S. H. (2015). *Demografi dan Korupsi*. Kolom Opini Kompas.
<https://sonnyharmadi.com/2015/03/11/demografi-dan-korupsi/>
- Badan Pusat Statistika. (2022). *Jumlah Penduduk Usia 15 tahun ke Atas Menurut Golongan Umur 2021-2022*. <https://www.bps.go.id/indicator/6/715/1/jumlah-penduduk-usia-15-tahun-ke-atas-menurut-golongan-umur.html>
- Budiman Maman. (2020). *Kejahatan Korporasi di Indonesia*. Setara Press.
- C.F. Strong. (2010). *Modern Political Constitutions* (D. S. Widowatie (Ed.)). Nusa Media.
- CCN Indonesia. (2021). *Kasus Korupsi Paling Banyak di Pemerintah Kabupaten/Kota*

Sejak 2017. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211209143526-12-731989/kasus-korupsi-paling-banyak-di-pemerintah-kabupaten-kota-sejak-2017>

Chatrina Darul Rosikah dan Dessy Marliani Listaningsih. (2016). *Pendidikan Anti Korupsi*. Sinar Grafika.

Direktorat Putusan - Mahkamah Agung. (2017). *Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK / 2016/PN.Bdg*. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=ojang>

Direktorat Putusan - Mahkamah Agung. (2020). *Nomer349 PK/Pid.Sus/2020*. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/85e198d6977c048a52f3948f154e2664.html%0A>

Disemadi, H. S. (2021). Reformasi Sistem Peradilan Pidana Indonesia Berwawasan Pancasila. *KERTHA WICAKSANA, 1*(Reformasi Sistem Peradilan Pidana), 10. <file:///C:/Users/HP/Downloads/2807-Article Text-13355-1-10-20210129.pdf>

Dwi Supriyadi Dkk. (n.d.). *Ensiklopedia Antikorupsi*.

H. Soenarko Setyodarmodjo. (2012). *Memberantas Korupsi di Indonesia Sebuah Antologi (Pertama)*. Shira Media.

Hadisoeparto, H. (2000). *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Liberty.

Hadjon, P. M. (1993). *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. UGM Press.

Hamzah, A. (2005). *Perbandingan Korupsi Diberbagai Negara*. Sinar Grafika.

Hartanti, E. (n.d.). *Korupsi dilingkungan Kekuasaan*.

Harun M, H. (2003). *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*. Rineka Cipta.

Herbert G. Hick. (n.d.). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.

<https://kbbi.web.id/jabat> diakses pada tanggal 22 Januari 2017 pada pukul 02.39 wib.

(2017).

Indroharto. (1993). *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*. Sinar Harapan.

Iwan Irawan. (2022). *SILA-SILA PANCASILA TERHADAP TINDAKAN KORUPSI*. i.

<https://binus.ac.id/character-building/pancasila/sila-sila-pancasila-terhadap-tindakan-korupsi/>

J. C. T. Simorangkir dkk. (2010). *Kamus Hukum*. Sinar Grafika.

Jawade, H. A. (2017). *Korupsi dalam Perspektif HAN*. Sinar Grafika.

Kaelan. (2010). *Pendidikan Pancasila*. Paradigma.

Kaligis, R. (2013). FUNGSI PENYELIDIKAN DALAM PROSES PENYELESAIAN PERKARA PIDANA. *Lex Crimen, Vol. II/No, 1*.

Kejaksaan Negeri Subang. (n.d.). *Kejaksaan Negeri Subang*. <https://kejari-subang.kejaksaan.go.id/>

Keputusan DPRD No. 01/SK/DPRD/1977. (n.d.).

Klitgaard, R. (2001). *Membasmi Korupsi*. Yayasan Obor Indonesia.

- Korupsi, U. N. 31 T. 1999 perubahan atas U. N. 20 T. 2001 tentang P. T. P. (n.d.). *UU Nomor 31 Tahun 1999 perubahan atas UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*.
- Lestari, S. E., & Djanggih, H. (2019). Urgensi Hukum Perizinan Dan Penegakannya Sebagai Sarana Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup. *Masalah-Masalah Hukum*, 48(2), 147. <https://doi.org/10.14710/mmh.48.2.2019.147-163>
- Mahkamah Konstitusi. (n.d.). *Putusan Nomor 73/PUU-IX/2011*.
- Marbun, S. . (2006). *Pokok – Pokok Hukum Administrasi Negara*. Liberty.
- Mertokusumo, S. (2009). Hukum Acara Perdata Indonesia. In *Hukum Acara Perdata Indonesia edisi ke 8* (hal. 294). Liberty.
- Mertokusumo, S. (2012). *Teori Hukum*. Cahaya Atma Pustaka.
- Moeljatno. (1997). *Asas-asas Hukum Pidana*. Putra Harsa.
- Moh. Mahfud, M. (2009). *Politik Hukum di Indonesia*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Mulyadi, L. (2007). *Hukum Acara Pidana*. Citra Aditya Bakti.
- Nizarli, R. (2012). *Hukum Acara Pidana*. CV. Bina Nanggroe.
- Nugroho, R. (2008). *Public Policy: Teori Kebijakan-Analisis Kebijakan-Proses Kebijakan, Perumusan, Implementasi , Evaluasi, Risk Managament dalam Kebijakan Publik Kebijakan Sebagai Fifth Estate, Metode Penelitian Kebijakan*. Elex Media Komputindo.

<i>Pengertian</i>	<i>Kewenangan</i>	<i>Pengertian</i>	<i>Kewenangan.</i>
http://www.negarahukum.com/hukum/pengertiankewenangan.html .			Diakses
Tanggal	5	Februari	2015.
http://www.negarahukum.com/hukum/pengertiankewenangan.html .			Diakses
Tanggal 5 Februari 2015			

PP No. 43 Tahun 2012 Tentang Tata cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa. (2012).

PP Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. (1983). *PP No 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.*

Prasetyo, T. (2012). *Filsafat, Teori, dan Ilmu Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada.

Prins, D. (1989). *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Djambatan.

Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S. (n.d.). *GAGASAN NEGARA HUKUM INDONESIA*.

Raharjo, S. (2009). *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Penerbit Genta Publishing.

Rianto Adi. (2012). *Sosiologi Hukum : Kajian Hukum Secara Sosiologis*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Ridwan HR. (n.d.). *Hukum Administrasi Negara*.

- Ronny Hanitijo Soemitro. (1985). *Metode Penelitian Hukum*. Ghalia Indonesia.
- Setiadi, W. (2014). *Urgensi Reformasi Regulasi Dalam Rangka Mendukung Pembangunan Nasional*. Majalah Hukum Nasional.
- Shadhily, H. (1989). *Kamus Besar Indonesia*. Balai Pustaka.
- Simarmata, J. (2015). Perspektif Kebijakan Daerah dalam Konteks UU No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan Terkait. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 12(2), 1–34.
- Soekanto, S. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia.
- Soekanto, S. (2007). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Rajawali Press.
- Soerjono, S. (2005). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rajawali Press.
- Sudarsono. (2009). *Kamus Hukum*. Rineka Cipta.
- Tahir, H. (2010). *Proses Hukum Yang Adil Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Laksbang.
- Thaib, D. (1999). *Kedaulatan Rakyat Negara Hukum dan Kostitusi*. Liberty.
- Undang-Undang Dasar 1945. (1945). *Undang-Undang Dasar 1945*.
- Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan. (2004). *Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan*.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. (1981). *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.*

Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. (2014). *Undang Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.*

UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945.
(1945). *UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945* (hal. 1).